

Laporan Kinerja  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Bontang

**KPKNL**  
Bontang

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEU.  
REPUBLIK INDONESIA



# KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), sebagai instansi pemerintah perlu dilakukan penyusunan LAKIN Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Bontang selama kurun waktu

1 (satu) tahun, yaitu pada tahun 2022. Penyusunan LAKIN ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bontang sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara, telah menerapkan sistem *Balance Score Card* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. Performa KPKNL Bontang dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja *Kemenkeu Three*, antara Kepala KPKNL Bontang dengan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN 2022 ini didasarkan pada hasil capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bontang Tahun 2022 sebesar 116,16%, Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective* (30%), *customer perspective* (17,15%), *internal process perspective* (34,78%), dan *learning and growth perspective* (34,23%).



Pada Tahun 2022, KPKNL Bontang mendapat tantangan baru dengan masuknya wilayah Kabupaten Berau menjadi wilayah kerja KPKNL Bontang, keikutsertaan KPKNL Bontang dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBBM) serta Lomba Pengelolaan Arsip Tingkat DJKN Tahun 2022. Tantangan tersebut disikapi oleh pegawai KPKNL Bontang dengan terus meningkatkan integritas dan sinergi dengan berbagai pihak serta meningkatkan kualitas layanan kepada para pengguna jasa dan mitra kerja KPKNL Bontang.

Laporan kinerja ini disajikan untuk memberikan gambaran secara detail dan transparan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan di KPKNL Bontang dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan KPKNL Bontang. Penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan evaluasi bagi KPKNL Bontang untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan akan terus diterapkan agar setiap tugas terselesaikan dengan baik.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Bontang yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Atas seluruh usaha yang telah dilakukan setiap jajaran KPKNL Bontang dalam mewujudkan kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Bontang, 30 Januari 2023

**Kepala Kantor**



**Harist Syafiuddin**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Bontang Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LAKIN ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bontang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan KPKNL Bontang.

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN, KPKNL Bontang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.



Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi DJKN yang juga menjadi misi KPKNL Bontang, yaitu: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum, (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara, (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Bontang adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi para pengguna layanan.

Untuk mengukur kinerja KPKNL Bontang menerapkan sistem *Balanced Score Card* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif dalam perencanaan strategis, alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, koheren, terukur dan berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian berdasarkan IKU yang telah disusun dan ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peta sasaran strategis. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Bontang Tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bontang Tahun 2022, sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**, dengan 2 implementasi IKU yaitu IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang serta Persentase Produktivitas Lelang. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berhasil tercapai pada angka 193,26% dari target 100%. Disamping itu, IKU Persentase Produktivitas Lelang juga berhasil melampaui target dari 36% menjadi 44,88%.
2. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa** diimplementasikan dalam IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang (setelah adendum) dengan capaian sebesar 213,89% dari target 100% dan IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara dengan capaian sebesar 184,62% dari target 100%.
3. **Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi** dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL yang berhasil melampaui target pada 4,5 dengan capaian 4,89.



4. **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal** dengan 4 implementasi IKU. Keempat IKU dapat melampaui target yang telah ditetapkan. IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan capaian sebesar 88,93% dari target sebesar 65%. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan mencapai 125% (35 bidang tanah) dari target 100% (28 bidang tanah). IKU Persentase Penyelesaian BKPN (setelah adendum) mencapai 160% (16 KPN) dari target 100% (10 BKPN). IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) berhasil tercapai pada angka 127,49% dari target 100%.
5. **Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional** dengan IKU Implementasinya terkait Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian. Adapun realisasi IKU sebesar 0% dari target 19%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi data minimize, semakin rendah capaian dari target, semakin baik.
6. **Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif** dengan 2 implementasi IKU. IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dengan capaian sebesar 100% dari target 92%. IKU Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN dengan realisasi 0% dari target 10%. IKU ini termasuk IKU dengan polarisasi data minimize.
7. **Edukasi yang Efektif** diimplementasikan dengan IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dengan capaian sebesar 99% dari target 92%.
8. **Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif** dengan IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara yang tercapai pada angka 100% dari target 85%.
9. **SDM yang Kompeten** dengan IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai pada angka 120% dari target 100%.
10. **Organisasi yang Fit for Purpose** yang diimplementasikan dalam 3 IKU. IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM tercapai pada angka 94,47 dari target 85. IKU Nilai Review Pengelolaan Kinerja dengan capaian sebesar 96,63 dari target 80. IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan capaian sebesar 99,41 dari target 90.
11. **Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal** diimplementasikan dalam 2 IKU. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi 92,2% dari target 95,5%. IKU ini merupakan satu-satunya IKU yang tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan terdapat kenaikan tarif dasar listrik dan BBM serta penambahan wilayah kerja Kabupaten Berau. Anggaran Tahun 2022 belum mengakomodasi perubahan tersebut, sehingga tidak dimungkinkan dilakukan efisiensi anggaran. IKU selanjutnya adalah Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan yang tercapai pada angka 183% dari target 100%.

Secara keseluruhan, **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bontang Tahun 2022 sebesar 116,16%**. Hal ini dapat terwujud atas sinergi dan kerja sama yang baik seluruh insan KPKNL Bontang.



## Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VI

### BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
Tugas dan Fungsi Organisasi	1
Struktur Organisasi	2
B. PERAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN	11

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA	18

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022	21
Target dan Jangka Menengah serta Renja Kemenkeu 2022	23
Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
Program Inovasi dan Efisiensi Sumber Daya	43
Rencana Aksi	44
B. REALISASI ANGGARAN	46

### BAB IV PENUTUP

47



# BAB I PENDAHULUAN

## A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Bontang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terhitung mulai bulan Januari 2022 terdapat perubahan dan penyesuaian wilayah kerja pada KPKNL termasuk wilayah kerja KPKNL Bontang yaitu Kabupaten Berau yang semula masuk ke dalam wilayah kerja KPKNL Tarakan masuk ke dalam wilayah kerja KPKNL Bontang sehingga wilayah kerja KPKNL Bontang menjadi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.



KPKNL Bontang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, **KPKNL Bontang menyelenggarakan fungsi:**

- inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- pelaksanaan pelayanan penilaian;
- pelaksanaan pelayanan lelang;
- penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- pelaksanaan administrasi KPKNL.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, **struktur organisasi pada KPKNL Bontang** terdiri dari:

### 1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

### 2) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.

### 3) Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.





#### 4) Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

#### 5) Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

#### 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Terdapat dua jabatan fungsional di KPKNL Bontang, yaitu Pelelang dan Penilai Pemerintah. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bagan struktur organisasi KPKNL Bontang Tahun 2022 sebagai berikut :

*Gambar 1.1 Struktur Organisasi*





KPKNL Bontang mempunyai 23 (dua puluh tiga) orang pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dengan komposisi berdasarkan tingkat golongan, jabatan, dan pendidikan adalah sebagai berikut :

*Tabel I.1 Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan golongan per 31 Des 2022*

No.	Pegawai	II				III				IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	<u>Eselon III</u>										1			1
2.	<u>Eselon IV</u>						3	1	1					5
3.	<u>Jabatan Fungsional</u>					3	1	1						5
4.	<u>Pelaksana</u>	1		3	2	6								12
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>

*Tabel I.2 Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan per 31 Des 2022*

No.	Pegawai	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D-I	D-III	D-IV/S1	S2	
1.	<u>Eselon III</u>					1	1
2.	<u>Eselon IV</u>				2	3	5
3.	<u>Jabatan Fungsional</u>				5		5
4.	<u>Pelaksana</u>		3	3	6		12
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>23</b>



# IKHTISAR PERAN, CAPAIAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Deviasi

ketergunaan hasil **0%**

penilaian

IKPL

Penilaian **4.9**

Jumlah Laporan **116**

Penilaian (2022)

Permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak adanya SDM Penilai Pemerintah Ahli Muda maupun Madya. Beberapa objek penilaian yang masuk kedalam wilayah kerja KPKNL Bontang memiliki persyaratan bahwa penilaian harus dilakukan oleh SDM dengan jabatan tersebut. Sehingga, pada Tahun 2022 ditemukan probis penilaian yang tidak efektif terkait dengan Reviu berjenjang atas Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN.

Terwujudnya  
pengurusan piutang  
negara yang optimal

Capaian PNBP

Piutang Negara **Rp11.534.419.24**

Penurunan

Outstanding **Rp221.539.107,27**

Jumlah BKPN

terselesaikan **16 berkas**

IKPL Piutang

Negara **4.8**

Penerimaan PNBP dari Piutang Negara tercapai sebesar 96,12% dari target. Hal ini disebabkan karena debitur yang tidak merealisasikan janji untuk melunasi utangnya, penyerah piutang yang tidak segera menindaklanjuti permintaan kelengkapan dokumen penyerahan serta pengenaan tarif PNBP biad PPN sebesar 1% atas 5 BKPN yang lunas pada awal tahun 2022.

# IKHTISAR PERAN, CAPAIAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Mengelola kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Capaian PNBPN

Pengelolaan **Rp4.264.428.632**

BMN

Sertifikasi

BMN

**35 bidang tanah**

Portofolio

Aset

**127,49%**

IKPL PKN

**5**

Permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak banyak aset negara yang memiliki nilai signifikan berada di wilayah kerja KPKNL, kewenangan terbatas pada pemanfaatan BMN serta satker yang tidak kooperatif dalam hal sertifikasi BMN, kesesuaian SBSK dan portofolio aset

Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Capaian PNBPN

Pengelolaan

Lelang

**Rp2.414.459.730**

Realisasi frekuensi e-auction

**3 kali**

Produktivitas lelang

**44,88%**

IKPL Lelang

**4.8**

Permasalahan utama yang dihadapi adalah pokok dan bea lelang masih didominasi oleh kontribusi lelang pegadaian, 162 lelang TAP (eksekusi HT) dan lelang batal (pengumuman memuat informasi yang salah)

## B. PERAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, **KPKNL Bontang memiliki peran strategis sebagai berikut:**

- 1 Mengelola kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN di daerah yang berperan dalam mengelola kekayaan Negara, KPKNL Bontang memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang berada di wilayah kerjanya. Pengelolaan kekayaan negara yang efektif dan efisien dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara dapat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Bontang terhadap sasaran strategis ini adalah tidak adanya aset-aset negara yang memiliki nilai yang besar. Mayoritas aset-aset negara yang berada di wilayah kerja KPKNL Bontang memiliki nilai yang tidak signifikan, sehingga manfaat ekonomi berupa penerimaan negara yang dihasilkan dari aset tersebut juga tidak terlalu besar.

Selain itu, kewenangan KPKNL Bontang hanya pada pemanfaatan Barang Milik Negara yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga atau mitra swasta dikarenakan sebagian besar menggunakan mekanisme sewa dengan nilai yang kecil, sebagai contoh sewa kantin dan koperasi.

Skema sewa ini belum tentu merupakan skema pemanfaatan aset yang paling optimal untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat, padahal terdapat beberapa skema kerja sama dapat ditempuh seperti Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 2 Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Pelayanan lelang dihadirkan sebagai salah satu sarana jual beli aset secara umum. Sebagian besar lelang dilakukan adalah lelang Hak Tanggungan, untuk melaksanakan suatu putusan atau penetapan pengadilan, melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang, seperti Barang Milik Negara, dan lain-lain. Tidak hanya terbatas pada eksekusi dan non-eksekusi wajib, KPKNL Bontang juga melayani permohonan lelang sukarela UMKM.



Pada Tahun 2022 KPKNL Bontang tetap menyelenggarakan lelang dengan bekerja sama dengan Pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di wilayah kerja KPKNL Bontang yang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

Penggalan potensi lelang juga terus diupayakan kepada Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholders* lainnya secara terus menerus dan berkesinambungan untuk dapat meningkatkan permohonan pelaksanaan lelang. Selain itu, KPKNL Bontang juga berusaha untuk lebih mengenalkan lelang kepada masyarakat umum dengan menggunakan media sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari bea lelang.

Untuk mewujudkan pelayanan lelang yang lebih modern, saat ini KPKNL Bontang telah menggunakan aplikasi *e-Auction* untuk pelaksanaan lelang. Namun tidak hanya terbatas pada pelaksanaan lelang, KPKNL Bontang juga telah menggunakan modul permohonan *online* yang terdapat pada aplikasi *e-Auction* untuk menerima permohonan lelang. Tercatat selama Tahun 2022, jumlah realisasi frekuensi *e-Auction* sebanyak 188 kali dan *e-conventional Auction* sebanyak 3 kali. Pengelolaan lelang yang semakin modern ini diharapkan dapat berpengaruh pada kenaikan tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tercapainya target pokok lelang dan bea lelang pada KPKNL Bontang tahun 2022 masih didominasi oleh kontribusi lelang pegadaian sebesar 66%. Beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bontang terkait lelang antara lain kondisi barang yang dilelang tidak *marketable*, jumlah lelang TAP mengingat objek lelang masih didominasi dengan objek tanah/bangunan yang masuk ke dalam jenis lelang eksekusi dengan nilai yang cukup tinggi serta lelang batal disebabkan karna pengumuman yang dipublish memuat informasi yang salah.

### 3 Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Penilaian merupakan salah satu *supporting system* dalam pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian / Lembaga Negara. Hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. Dengan demikian hasil penilaian diharapkan dapat turut membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.





Tidak hanya terbatas untuk pengelolaan barang milik negara, Penilai Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel pada Pemerintah Daerah dan terciptanya *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selama Tahun 2022, terdapat 116 laporan penilaian yang dihasilkan oleh Jafung Penilai KPKNL Bontang yang terdiri dari 70 laporan penilaian BMN dan 46 laporan penilaian BMD.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Bontang terhadap sasaran strategis ini adalah tidak adanya SDM Penilai Pemerintah Ahli Muda maupun Madya. Beberapa objek penilaian yang masuk kedalam wilayah kerja KPKNL Bontang memiliki persyaratan bahwa penilaian harus dilakukan oleh SDM dengan jabatan tersebut. Sehingga, pada Tahun 2022 ditemukan probis penilaian yang tidak efektif terkait dengan Reviu berjenjang atas Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN.

#### 4 Terwujudnya Piutang Negara yang Optimal

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang diserahkan oleh Penyerah Piutang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara mendefinisikan Penyerah

Piutang sebagai Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing*, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.

Sepanjang tahun 2022 pengurusan Piutang Negara, khususnya yang dilakukan oleh KPKNL Bontang, dapat terlaksana secara optimal dikarenakan adanya penguatan pada aspek regulasi. Penguatan pada aspek regulasi ini ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2022. Khusus terkait dengan program keringanan hutang, KPKNL Bontang berhasil menyelesaikan 2 (dua) BKPN.





Dengan demikian, program keringanan hutang ini turut menyumbang pada tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bontang. Pada sisi yang lain, program keringanan hutang ini juga turut membantu Penanggung Hutang yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya hutangnya.

Pada tahun 2022, KPKNL Bontang menyelesaikan target penurunan *outstanding* piutang negara sebanyak Rp 221.539.107,27 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh koma dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 184,62% dari target. Sedangkan realisasi PNBPN yang berasal Biaya Administrasi PUPN tercapai sebesar Rp11.534.419,24 (sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan belas koma dua puluh empat rupiah) atau sebesar 96,12% dari target. Tidak tercapainya penerimaan PNBPN yang berasal dari Biad PN disebabkan karena beberapa hal antara lain, debitur yang tidak merealisasikan janji untuk melunasi utangnya, dokumen pengurusan piutang negara yang beragam serta beberapa tidak memiliki format baku, penyerah piutang yang tidak segera menindaklanjuti permintaan kelengkapan dokumen penyerahan dan serta pengenaan tarif PNBPN biad PPN sebesar 1% atas 5 BKPN yang lunas pada awal tahun 2022.





## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika pelaporan adalah sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Bontang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Bontang dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, selama tahun 2022, KPKNL Bontang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2022, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Bontang pada tahun berikutnya





# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bontang merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. KPKNL Bontang sebagai instansi vertikal DJKN di daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat di wilayah kerja KPKNL Bontang.

Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”



Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Bontang sebagai lembaga/institusi vertikal DJKN di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di lingkup wilayah kerja Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara di wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi**, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. **Tujuan** yang hendak dicapai oleh **KPKNL Bontang** untuk **periode 2020 s.d. 2024** adalah:

- Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat, finansial dan sosial;
- pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang *agile*, efektif dan efisien.

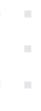
Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Bontang telah menetapkan **11 (sebelas) sasaran strategis** yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebagai berikut:





1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa
3. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
4. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
5. Pelaksanaan penilaian yang akunabel dan profesional
6. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif
7. Edukasi yang efektif
8. Pengawasan dan pengendalian yang efektif
9. SDM yang kompeten
10. Organisasi yang *Fit for Purpose*
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Bontang. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. **Strategi KPKNL Bontang** yang akan ditempuh dapat dilihat pada tabel halaman selanjutnya.



Tabel II.1 Strategi KPKNL Bontang

<b>Tujuan Jangka Menengah (2020 s.d. 2024)</b>	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.
<b>Kondisi yang ingin dicapai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</li> <li>• Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel</li> <li>• Pengawasan dan pengendalian yang efektif</li> </ul>
<b>Strategi yang ditempuh</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.</li> <li>b. Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.</li> <li>c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.</li> <li>d. Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN.</li> <li>e. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang Kekayaan Negara pada satker-satker di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dan penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada <i>stakeholder</i>.</li> <li>f. Optimalisasi BMN melalui reviu kinerja BMN, penggunaan bersama oleh beberapa unit, serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.</li> <li>g. Mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan menggunakan indikator Standar Barang dan Standar Kebutuhan.</li> <li>h. Percepatan sertipikasi BMN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam aplikasi SIMANTAP</li> <li>• Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kanwil DJKN, Kanwil BPN dan satker- satker Kementerian/Lembaga terkait program sertifikasi BMN berupa tanah.</li> <li>• Pembentukan Tim Pokja Percepatan Sertipikasi BMN berupa tanah.</li> <li>• Peningkatan koordinasi antara Kanwil DJKN, Kanwil BPN, KPKNL, Kantor Pertanahan dan satker-satker Kementerian/Lembaga</li> </ul> </li> </ol>



<b>Tujuan Jangka Menengah (2020 s.d. 2024)</b>	Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya
<b>Kondisi yang ingin dicapai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pelayanan lelang yang optimal</li> <li>• Terwujudnya PNBP dari pelayanan lelang yang optimal</li> </ul>
<b>Strategi yang ditempuh</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta dan UMKM untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang dengan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.</li> <li>• Pembuatan database pelaksanaan lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan</li> </ul> </li> <li>b. Improvisasi dan inovasi sosialisasi lelang guna peningkatan pelayanan (modernisasi lelang melalui <i>e-auction</i>)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi seluruh proses pelaksanaan lelang guna peningkatan pelayanan dari permohonan, pelaksanaan hingga layanan pasca lelang</li> <li>• Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi e-auction kepada stakeholder.</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa lelang agar lebih berkualitas</li> </ul> </li> <li>c. Peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Focus Grup Discussion yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang</li> <li>• Pelaksanaan <i>Capacity Building</i> bagi Pelelang pada KPKNL Bontang dalam rangka penyamaan persepsi guna keseragaman dan tambahan pemahaman peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, kemampuan teknis, keterampilan dan memiliki kepribadian dan sikap integritas tinggi, objektif, teliti, jujur, dan bertanggung jawab.</li> </ul> </li> </ol>





<b>Tujuan Jangka Menengah (2020 s.d. 2024)</b>	Peningkatan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien
<b>Kondisi yang ingin dicapai</b>	Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien
<b>Strategi yang ditempuh</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan knowledge sharing, diskusi berkala, inhouse training di bidang penilaian</li> <li>Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan kaji ulang laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan tim penilai</li> <li>Melakukan survey data harga sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang ada di seluruh wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.</li> <li>Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional</li> </ol>

<b>Tujuan Jangka Menengah (2020 s.d. 2024)</b>	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien
<b>Kondisi yang ingin dicapai</b>	Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang agile, efektif dan efisien
<b>Strategi yang ditempuh</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi <i>Work From Home/Work From Homebase</i> secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prinsip <i>Work Life Balance</i>.</li> <li>Penerapan Business Continuity Plan (BCP) atau Manajemen Keberlangsungan Bisnis sebagai strategi untuk menjamin keberlangsungan layanan utama setelah terjadinya gangguan, mengurangi dampak gangguan terhadap organisasi, meningkatkan kesadaran para pejabat/pegawai akan pentingnya kelangsungan bisnis organisasi, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan stakeholders terhadap penyelenggaraan layanan yang berkelanjutan dalam kondisi kahar/bencana.</li> <li>Penguatan budaya Kementerian Keuangan (<i>the new thinking of working</i>, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai) melalui budaya apel pagi.</li> <li>Implementasi Tata Kelola TIK yang andal sesuai <i>best practice</i>.</li> <li>Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)</li> </ol>



## B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Bontang. Sasaran Strategis KPKNL Bontang Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Bontang. Peta Strategi KPKNL Bontang 2022 memuat 11 Sasaran Strategis seperti berikut:

Grafik II.1 Peta Strategis KPKNL Bontang



Peta Strategis DJKN mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategis KPKNL Bontang Tahun 2022 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Bontang mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (Dua puluh) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2 Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu-Three

<b>Sasaran Strategis 1</b> <b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian</b>		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persen	100%
2. Persentase produktivitas lelang	Persen	36%
<b>Sasaran Strategis 2</b> <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>		
3. Persentase Realisasi Pokok Lelang (setelah addendum)	Persen	100%
4. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Persen	100%
<b>Sasaran Strategis 3</b> <b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>		
5. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,5
<b>Sasaran Strategis 4</b> <b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>		
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Persen	65%
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	Persen	100%
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (setelah addendum)	Persen	100%
9. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Persen	100%
<b>Sasaran Strategis 5</b> <b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>		
10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Persen	19%
<b>Sasaran Strategis 6</b> <b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>		
11. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	Indeks	92%
12. Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	Persen	10%



<b>Sasaran Strategis 7</b> <b>Edukasi yang Efektif</b>		
13. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Indeks	92
<b>Sasaran Strategis 8</b> <b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>		
Indikator Kinerja	Satuan	Target
14. Presentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	Persen	85
<b>Sasaran Strategis 9</b> <b>SDM yang Kompeten</b>		
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persen	100
<b>Sasaran Strategis 10</b> <b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>		
16. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menui WBBM	Nilai	94,47
17. Nilai Review Pengelolaan Kinerja	Nilai	96,63
18. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	99,41
<b>Sasaran Strategis 11</b> <b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal</b>		
19. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	95,5
20. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Persen	100





# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Bontang tahun 2022 telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu Three*. Pencapaian IKU tahun 2022 pada umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 116,16%**. Adapun Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2022 dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Tabel III.1 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2022

**Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**  
**Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara**  
**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	193,26%	120
		Persentase produktivitas lelang	36%	44,88%	120
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang (setelah addendum)	100%	213,89%	120
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	184,62%	120
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.5	4.89	108.67
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	88.93%	120
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	125%	120
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPn) (setelah addendum)	100%	160%	120
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	127.49%	120
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,00%	120
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108.70
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0%	120
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92,00	99,00	107.61
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100%	117.65
9	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120
10	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	94.97	111.73
		Nilai review pengelolaan kinerja	80	96.63	120
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99.41	110.45
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	92,20%	96.54
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	183%	120
<b>Jumlah Anggaran Program Tahun 2022</b>			<b>Rp1.236.938.000</b>		
<b>Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022</b>			<b>Rp1.230.325.955</b>		

## 1. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2022

Dalam lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh oleh KPKNL Bontang menunjukkan hasil yang cukup stabil. Selama tahun 2018-2022, NKO terkecil yang diperoleh KPKNL Bontang terjadi di Tahun 2020 sebesar 103.26%. Hal ini disebabkan karna adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melemahkan semua sektor global. Adapun NKO tertinggi, diperoleh pada Tahun 2022 yang menunjukkan persentase sebesar 116.16%. Disamping itu, capaian NKO sebesar 116,16% berhasil membawa KPKNL Bontang sebagai kantor peraih NKO tertinggi di Lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Grafik III.1 NKO KPKNL Bontang Tahun 2018-2022



Perolehan NKO yang tinggi pada Tahun 2022 didukung oleh keberhasilan IKU pada masing-masing subbagian/seksi yang mencapai target, perolehan Unit Kerja Berpedikat ZI-WBBM dengan nilai sebesar 94,97 yang berpengaruh terhadap Nilai Kinerja Organisasi. Prestasi lainnya yang dicapai oleh KPKNL Bontang pada Tahun 2022 adalah Juara II Lomba Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN.

Gambar III.1 Penghargaan yang diperoleh KPKNL Bontang Tahun 2022





Penjelasan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel III.2 Perbandingan NKO Tahun 2018-2022

Tahun	Sasaran Strategis	IKU Kemenkeu Three	NKO	Keterangan (IKU Implementasi yang tidak memenuhi target)
2018	12	17	114.85%	IKU persentase implementasi e-auction berwarna kuning dengan realisasi sebesar 83,45% dari target 85%.
2019	12	16	112.52%	IKU persentase hasil lelang berwarna kuning dengan realisasi sebesar 85,33% dari target sebesar 100%
2020	12	20	103.26%	Terdapat 2 IKU implementasi berwarna merah. -IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan realisasi sebesar 76.71% dari target sebesar 100% -IKU persentase hasil lelang (pokok lelang) dengan realisasi sebesar 56.91% dari target sebesar 100%
2021	10	22	113.19%	IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran berwarna kuning dengan realisasi sebesar 91.44% dari target sebesar 95.5%
2022	11	20	116,16%	IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran berwarna kuning dengan realisasi sebesar 92.20% dari target sebesar 95.5%

Perhitungan NKO Tahun 2022 menggunakan bobot sesuai KMK 467/KMK.01/2014. Hal ini dikarenakan Tahun 2022 merupakan masa peralihan. Adapun bobot perhitungan peta strategi dengan 4 perspektif sebagai berikut :

- Stakeholder (25%)
- Customer (15%)
- Internal Process (30%)
- Learning and growth (30%)



## 2. TARGET JANGKA MENENGAH DAN RENJA KEMENKEU 2022

Dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, terdapat 4 tujuan yang hendak dicapai KPKNL Bontang selama periode 2020 s.d. 2024. Keempat tujuan akan dijabarkan sebagai berikut :

### 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Sasaran strategis KPKNL Bontang yang beririsan dengan tujuan dan indikator kinerja Renja Kemenkeu tersebut yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal dan Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif. Kedua sasaran strategis ini tercapai pada realiasi sebesar 120% dan 117.65%.

### 2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Tujuan ini sejalan dengan Renja Kemenkeu yaitu persentase realisasi penerimaan negara yang ditargetkan sebesar 100%. Sasaran strategis KPKNL Bontang yang beririsan denganrenja tersebut berupa Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian, Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Efektif. Masing-masing sasaran strategis tersebut diimplementasikan ke dalam IKU-IKU sebagai berikut: Masing-masing sasaran strategis ini tercapai pada realisasi sebesar 120%, 120% dan 114,35%.

### 3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Tujuan ini termuat dalam sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan IKU implementasinya berupa Deviasi ketergunaan hasil penilaian. Adapun sasaran srategis ini tercapai pada realisasi sebesar 120%.

### 4) Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang agile, efektif dan efisien

Tujuan ini termuat dalam Renja Kemenkeu dengan Indikator Kinerja berupa Nilai Kinerja anggaran K/L, Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan, Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kemenkeu, dan Tingkat Implementasi *learning organization* .

Adapun capaian pada KPKNL Bontang Tahun 2022 yang beririsan dengan target jangka menengah tahun 2020 s.d. 2024 dan Renja Kemenkeu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III.3 Renja Kemenkeu, Target Jangka Menengah dan Sasaran Strategis

No	Renja Kemenkeu			Target Jangka Menengah KPKNL Bontang (2020 s.d. 2024)	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja KPKNL Bontang		
	Kode	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target		Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	42	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.		Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>		<b>120%</b>
	42.01	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	60%		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	88,93
					Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	125%
					Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (setelah addendum)	100%	160%
					Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	127,49%
					<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>		<b>117,65%</b>
					Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	100%
2	21	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal		Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian</b>		<b>120%</b>
	21.02	Persentase realisasi penerimaan negara	100%		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	193,26%
					Persentase Produktivitas Lelang	36%	44,88%
					<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>		<b>120%</b>
					Persentase Realisasi Pokok Lelang (setelah addendum)	100%	213,89%
					Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	184,62%
					<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>		<b>114,35%</b>
					Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%
					Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0%

3				Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional. Deviasi ketergunaan hasil penilaian.		120% 19% 0%	
4	51	Organisasi dan SDM yang Optimal			<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>		<b>108,67%</b>	
	51.01	Indeks Kepuasan Pengguna layanan Kementerian Keuangan.	4.1	Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang agile, efektif dan efisien.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.5	4.89	
	51.03	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu.	89%		Edukasi yang Efektif			107,61%
					Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92	99	
					SDM yang Kompeten			120%
					Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	
					Organisasi yang Fit For Purpose			114,06%
	51.04	Tingkat implementasi learning organization	80%		Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	94.97	
				Nilai review pengelolaan kinerja	80	96.63		
				Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99.41		
	41	Pelaksanaan dan pertanggung-jawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.			<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>		<b>108,27%</b>	
	41.03	Nilai kinerja anggaran K/L	81.2		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	92.20%	
					Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	183%	
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2022</b>							<b>116,16%</b>	



### 3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) *IKU Kemenkeu Three Tahun 2022* diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan *IKU Kemenkeu Three Tahun 2022* sebagai berikut:

- 1). Sasaran Strategis **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian** dengan *IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang* dan *IKU Persentase produktivitas lelang*.

Target penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2022 sebesar Rp3.462.000.000,00, realisasinya adalah sebesar Rp6.690.422.781,24 (193,26%) dengan rincian sebagai berikut:

- PNBP Pengelolaan BMN dengan target sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan capaian Rp4.264.428.632,00
- PNBP Piutang Negara dengan target sebesar Rp12.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp11.534.419,24
- PNBP Lelang dengan target sebesar Rp1.150.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp2.414.459.730,00

Dari uraian di atas, secara keseluruhan capaian penerimaan negara tahun 2022 telah melebihi target. Namun, PNBP Piutang Negara masih kurang Rp465,580.76 (3,88%) dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antarlain, debitur menyangkal memiliki hutang, debitur yang tidak merealisasikan janji untuk melunasi utangnya, dokumen pengurusan piutang negara yang beragam serta beberapa tidak memiliki format baku, penyerah piutang yang tidak segera menindaklanjuti permintaan kelengkapan dokumen dan pengenaan tarif PNBP biad PPN sebesar 1% atas 5 BKPN yang lunas pada tahun 2022. Hal ini tentu berpengaruh terhadap PNBP biad PPN yang rendah.

Atas risiko di atas, telah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Bontang untuk dapat membantu melengkapi berkas-berkas yang hingga saat ini belum dilengkapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Selain koordinasi, upaya penagihan melalui surat tagihan dan penagihan langsung ke alamat debitur telah dilakukan pada November 2022.

PNBP Pengelolaan BMN pada tahun ini cukup signifikan mengingat Satker di wilayah kerja KPKNL Bontang merupakan Satker yang luas tanah dan bangunannya relatif kecil sehingga tidak berpotensi dimanfaatkan serta sebagian besar Satker di wilayah kerja KPKNL Bontang menggunakan tanah dan bangunan Pemerintah Daerah yang belum dihibahkan. Atas risiko ini, telah dilakukan mitigasi berupa penggalian potensi PNBP dari sektor lain seperti pendapatan BLU lainnya yang ada di wilayah kerja KPKNL Bontang.





Penggalian yang dilakukan Tim Seksi PKN KPKNL Bontang pada Triwulan IV menemukan potensi baru berupa pemanfaatan aset BLU pada UPBU Kalimantan yang sangat signifikan menambah penerimaan negara.

Selanjutnya, tercatat selama tahun 2022, terdapat 303 frekuensi lelang dengan rincian 136 lelang laku, 5 lelang wanprestasi dan 162 lelang TAP. Walaupun lot lelang TAP jauh melebihi lot lelang laku, namun begitu untuk capaian produktivitas lelang masih melebihi persentase yang ditargetkan untuk tahun ini sebesar 44,88% dari target 36%. Mitigasi yang telah dilaksanakan KPKNL Bontang terkait permasalahan ini adalah ikut memasarkan objek lelang melalui media sosial KPKNL Bontang. Ke depan, KPKNL Bontang melalui Seksi Lelang akan selalu melakukan penggalian potensi secara periodik terhadap para stakeholder dan pengguna jasa terutama untuk Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang biasanya memiliki nilai pokok lelang yang tergolong besar.

Strategi yang ditempuh terkait PNBPN Pengelolaan Lelang hingga target dapat tercapai berupa pemberian dorongan penjual lelang Hak Tanggungan untuk lebih giat memasarkan objek-objek lelang Hak Tanggungan.

*Tabel III.4 Capaian IKU Kemenkeu - Three Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian*

KPKNL BONTANG	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian							
	1a-CP Presentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	54,04%	70,41%	70,41%	105,85%	105,85%	193,26%	193,26%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian							
	1b-CP Presentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ K P
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	Max / TLK
Realisasi	30%	35,63%	35,63%	43,26%	43,26%	44,88%	44,88%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



- 2) Sasaran Strategis **Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa** dengan IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dan Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL dalam hal ini Jabatan Fungsional Pelelang dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Realisasi pokok lelang untuk lelang yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pelelang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp36.762.290.979 dari target sebesar Rp16.000.000,00. Sedangkan realisasi pokok lelang pegadaian tahun 2022 sebesar Rp70.180.381.300,00 dari target sebesar Rp34.000.000.000,00. Sehingga total realisasi pokok lelang adalah sebesar Rp106.942.672.279 atau sebesar 213,89% dari target total sebesar Rp50.000.000.000,00.

Tercapainya target pokok lelang dan bea lelang pada KPKNL Bontang tahun 2022 masih didominasi oleh kontribusi lelang pegadaian sebesar 66%. Beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bontang terkait lelang antara lain kondisi barang yang dilelang tidak *marketable*, jumlah lelang TAP mengingat objek lelang masih didominasi dengan objek tanah/bangunan yang masuk ke dalam jenis lelang eksekusi dengan nilai yang cukup tinggi serta lelang batal disebabkan karna pengumuman yang dipublikasikan memuat informasi yang salah.

Adapun Realisasi penurunan nilai *outstanding* piutang negara pada tahun 2022 adalah sebesar 184,62% atau Rp221.539.107,27 dari target sebesar Rp 120.000.000,00. Atas IKU implementasi ini telah dilakukan pemetaan terhadap BKPN yang dapat ditetapkan sebagai PSBDT. Ke depannya, KPKNL akan terus melakukan penggalian potensi piutang yang dapat diserahkan kepada KPKNL sehingga memperluas potensi BKPN yang dapat diselesaikan baik melalui pelunasan maupun PSBDT.

Tabel III.5 Capaian IKU Kemenkeu -Three Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

KPKNL BONTANG	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	59,69%	114,27%	114,27%	164,06%	164,06%	213,89%	213,89%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



KPKNL BONTANG	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	57,79%	77,43%	77,43%	143,34%	143,34%	184,62%	184,62%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

3) Sasaran Strategis **Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi** dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL.

IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal. Dari 4 (empat) jenis layanan yang diukur indikatornya, realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar 4.89 atau sebesar 108,67% dari target sebesar 4.5.

Tingkat kepuasan pengguna layanan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan terhadap pengguna layanan KPKNL Bontang, yaitu layanan pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, layanan pengurusan piutang negara, dan layanan lelang. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pengguna layanan KPKNL Bontang. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL Bontang di mata masyarakat, khususnya pengguna layanan KPKNL Bontang. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan KPKNL Bontang. Nilai ini ditinjau dari 10 (sepuluh) unsur yaitu kejelasan persyaratan administrasi, kejelasan prosedur, waktu penyelesaian layanan, kejelasan biaya layanan, hasil produk/jasa layanan, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, kesopanan/keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, kesesuaian penyelesaian layanan dengan janji layanan, mekanisme penanganan pengaduan, dan kenyamanan sarana dan prasarana.

Adapun total jumlah populasi responden sebanyak 65, dimana 25 diantaranya dijadikan sample. Berikut penjelasan perolehan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) tiap seksi teknis pada KPKNL Bontang Tahun 2022:

- IKPL Pengelolaan Kekayaan Negara dengan total 5 (lima) responden mendapat skor akhir 5 dari 5.
- IKPL Piutang Negara dengan total 1 (satu) responden mendapat skor akhir 4.8 dari 5.
- IKPL Penilaian dengan total 6 (enam) responden mendapat skor akhir 4.9 dari 5.
- IKPL Lelang dengan total 13 (tiga belas) responden mendapat skor akhir 4.8 dari 5.





Pelaksanaan IKU ini dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan bahwa terdapat kendala waktu penyampaian dan pengumpulan hasil survei yang singkat. Langkah yang diambil untuk mengendalikan kendala adalah dengan adanya kontrol berkaladari Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara kepada KPKNL Bontang dan dari KPKNL Bontang kepada satker, sehingga pelaksanaannya dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Namun demikian, KPKNL Bontang tetap berusaha untuk meningkatkan kembali pelayanan yang telah dilaksanakan kemudian memperbaiki sesuai saran yang ada.

*Tabel III.6 Capaian IKU Kemenkeu -Three Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi*

KPKNL BONTANG	3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4,50	4,50	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,89	4,89	
Capaian	-	-	-	-	-	108,67%	108,67%	

- 4) Sasaran Strategis **Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal** dengan IKU implementasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan, Persentase Penyelesaian BerkasKasus Piutang Negara (BKPN) (setelah addendum) dan Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).

IKU persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) meliputi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2022) bobot 65% (87 NUP) dengan capaian 91,93% dan Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Tahun 2021 bobot 65% (73 NUP) dengan capaian 79,93%.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- pengurusan piutang negara; dan
- pelayanan lelang.





Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya. Utilisasi kekayaan negara adalah optimalisasi pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan, penetapan status penggunaan, hibah, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah.
- pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara dapat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada umumnya tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sudah cukup baik dengan nilai capaian sebesar 88,93% dengan target 65%, Namun terdapat beberapa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan penurunan nilai kesesuaian SBSK. Atas permasalahan ini telah dilakukan edukasi dan komunikasi kepada satker terkait untuk melakukan perbaikan aset dan menggunakan aset sesuai dengan standar ketentuan yang dianjurkan.

Selanjutnya, IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan berhasil tercapai dengan realisasi sebesar 125%. Pada tahun 2022, terdapat 35 bidang tanah yang berhasil disertifikatkan dari target sebesar 28 bidang. Permasalahan yang kerap ditemui pada pencapaian target adalah tidak dilengkapinya dokumen sertifikat atas objek BMN berupa tanah dan tidak kooperatifnya pihak lain yang menghambat program percepatan sertifikat BMN. Ke depan, Tim Seksi PKN akan terus berkoordinasi dan mendorong satker agar segera melengkapi dokumen yang diperlukan.

Kemudian, IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) meliputi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bobot 50 NUP aset dengan capaian 67 NUP aset (134%) dan Persentase Penyampaian Rekomendasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bobot 81 NUP aset dengan capaian 98 NUP aset (120,99%). Secara keseluruhan IKU ini tercapai dengan realisasi sebesar 20%.

Permasalahan yang ditemukan terkait portofolio aset berupa Satker yang tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN dan tidak menyampaikan laporan wasdal tepat waktu. KPKNL Bontang berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan sosialisasi secara rutin kepada Satker terkait.

Adapun untuk IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.





Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- BKPN lunas
- BKPN penarikan
- BKPN dikembalikan, dan
- BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Jumlah BKPN yang terselesaikan di 2022 sebanyak 16 berkas dari target 10 berkas Sehingga, realisasi tercapai hingga 160%. Tidak terdapat masalah dalam pencapaian target IKU ini. Rencana kerja tetap akan menindaklanjuti permohonan keringanan utang yang telah ditetapkan persetujuannya dan menetapkan PSBDT bagi debitur yang tidak diketahui keberadaannya (setelah dilakukan penelitian lapangan).

*Tabel III.7 Capaian IKU Kemenkeu - Three Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal*

KPKNL BONTANG	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max / TLK
Realisasi	-	96,91%	96,91%	93,81%	93,81%	88,93%	88,93%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	10,71%	46,43%	46,43%	60,71%	60,71%	125%	125%	
Capaian	53,57%	116,07%	116,07%	101,19%	101,19%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4c-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	85%	128,57%	128,57%	150%	150%	160%	160%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	14,45%	54%	54%	180,65%	180,65%	225,06%	225,06%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



## 4. PROGRAM INOVASI DAN EFISIENSI SUMBER DAYA

4

### Program dalam 2022



#### KPKNL Bekesah

Kegiatan bincang- bincang dan sharing session yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali dengan berbagai topik terkait tupoksi DJKN yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan. Kegiatan tersebut sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan engagement antara KPKNL Bontang dengan para pengguna layanan.

#### BMN Health Status

Inovasi yang dikembangkan dalam melakukan monitoring atas jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas dan jabatan pada KPKNL Bontang. Sumber daya dalam pengoperasian *BMN Health Status* mencakup sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya teknologi informasi.

#### OLIVE (*Online Verification*)

OLIVE merupakan alat bantu yang disusun dalam sebuah laman *Google Site* yang memberikan kemudahan bagi Pengguna Layanan atau *stakeholders* KPKNL Bontang mengenai kelengkapan berkas dalam mengajukan layanan dalam bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Lelang, dan Piutang Negara. OLIVE juga membantu petugas KPKNL Bontang untuk melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan berkas/dokumen.



#### GOSIP (GO-Arsip)

GOSIP merupakan aplikasi yang dikembangkan pada tahun 2022 dalam rangka pengelolaan arsip. GOSIP mempersingkat pencarian berkas atau dokumen yang diperlukan. Selain itu, GOSIP juga memantau retensi atau JRA suatu arsip.



## 5. RENCANA AKSI

Disusun dengan menyesuaikan program yang ada dalam RKA. Berikut uraian rencana aksi dari masing-masing Subbagian/Seksi/JF .

### Subbagian Umum

**3**

fokus  
kegiatan

- belanja modal peralatan dan mesin,
- kerumahtanggaan serta operasional
- pemeliharaan kantor.

### Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

**6**

fokus  
kegiatan

- sosialisasi, bimtek, FGD di bidang Barang Milik Negara
- penelitian awal dan pemberian rekomendasi permohonan pengelolaan kekayaan negara
- evaluasi kinerja BMN
- implementasi evaluasi SBSK
- pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN
- koordinasi satker terkait sertifikasi BMN.

### Seksi Piutang Negara

**5**

fokus  
kegiatan

- penggalian potensi piutang daerah kepada instansi pemerintah daerah
- penagihan piutang melalui media persuratan, Whatsapp dan pemanggilan,
- penelusuran terkait data penanggung hutang
- tindak lanjut pengurusan terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang
- penagihan lapangan.

### Seksi Kepatuhan Internal

**4**

fokus  
kegiatan

- pemantauan lapangan pelaksanaan lelang
- pemantauan lapangan survei penilaian
- pemantauan lapangan pengelolaan kekayaan negara
- pemantauan lapangan pengurusan piutang negara





## Seksi Hukum dan Informasi

**6**

fokus  
kegiatan

- tugas rutin Bendahara Penerimaan
- pelaksanaan advokasi hukum
- peliputan berita kegiatan seksi teknis/DJKN
- pengadaan alat dokumentasi
- pengelolaan media sosial dan website kantor
- publikasi

## Jabatan Fungsional Penilai

**4**

fokus  
kegiatan

- survei lapangan penilaian BMN
- survei lapangan penilaian BMD
- survei basis data properti
- survei data DKPB

## Jabatan Fungsional Pelelang

**3**

fokus  
kegiatan

- bimbingan teknis/sosialisasi/FGD di bidang lelang
- pembuatan risalah lelang yang cepat dan tepat
- penggalan potensi lelang.



## B. REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 KPKNL Bontang ditambah dengan pelimpahan pagu dari Tarakan (penambahan wilayah kerja Kabupaten Berau) sebesar Rp1.236.938.000 dengan penyerapan sebesar Rp1.230.325.955. Terdapat 5 Rincian Output (RO) dengan tingkat penyerapan sebesar 100% antara lain, Layanan Bantuan Hukum, Kerumahtanggaan, Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara, Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK dan Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara.

Tabel III.15 Realisasi Volume Rincian Output

Nama Rincian Output (RO)	Pagu Bontang + Tarakan + Topdown + Listrik + R4	Total Belanja	Sisa Anggaran
4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	272.000	272.000	0
4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	57.954.000	57.954.000	0
4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	1.046.127.000	1.045.881.614	245.386
4702.BMB.002 Kehumasan	8.445.000	8.249.075	195.925
4704.EBA.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	4.416.000	4.384.000	32.000
4796.BMB.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7.211.000	6.638.235	572.765
4796.BMB.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	4.013.000	3.896.000	117.000
4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	16.544.000	13.864.000	2.680.000
4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	9.056.000	9.056.000	0
4798.AAH.003 Risalah Lelang	16.576.000	16.300.000	276.000
4798.AAH.005 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	13.982.000	12.628.431	1.353.569
4798.FAE.001 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	2.892.000	2.551.100	340.900
4798.FAE.003 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	18.774.000	18.111.500	662.500
4798.FAE.004 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	20.388.000	20.388.000	0
4798.FAE.006 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2.128.000	2.128.000	0
4798.FAE.007 Rekomendasi Hasil Penilaian	8.160.000	8.024.000	136.000
<b>Total</b>	<b>1.236.938.000</b>	<b>1.230.325.955</b>	<b>6.612.045</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Bontang ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Bontang sebagai instansi vertikal DJKN di daerah serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah sesuai dengan yang target bahkan beberapa di antaranya memperoleh capaian di atas 100 persen.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Bontang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, dengan cara:
  - Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN.
  - Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.
  - Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
  - Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN.
  - Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang Kekayaan Negara pada satker-satker di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau serta penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder*.
  - Optimalisasi BMN melalui reviu kinerja BMN, penggunaan bersama oleh beberapa unit, serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.
  - Mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan menggunakan indikator Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
  - Percepatan sertifikasi BMN:
- 2) Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya, dengan cara:
  - Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja Kota Bontang Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi.
  - Improvisasi dan inovasi sosialisasi lelang guna peningkatan pelayanan (modernisasi lelang melalui *e-auction*).
  - Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang.
- 3) Peningkatan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien, dengan cara:
  - Melakukan kegiatan *knowledge sharing*, diskusi berkala, *in house training* di bidang penilaian.
  - Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan kaji ulang laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
  - Melakukan survey data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang ada di seluruh wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
  - Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

4) Terwujudnya Pengurusan Piutang Negara yang optimal dan terwujudnya PNBP dari pengurusan piutang negara yang optimal, dengan cara:

- Mengoptimalkan upaya penagihan
- Melakukan *debtor tracing* dan *asset tracing*, dengan jalan berkoordinasi dengan instansi/*stakeholder* terkait untuk mencari/memeriksa debitur yang belum diketahui keberadaannya atau mencari aset/harta kekayaan lain yang dimiliki debitur;
- Melakukan inventarisasi berkas piutang negara penyerahan dari Kementerian/Lembaga serta mengoptimalkan tingkat pengurusan piutang negara;
- Melakukan inventarisasi pengurusan piutang negara penyerahan.

5) Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang *agile*, efektif, dan efisien, dengan cara:

- Organisasi dan SDM yang optimal.
- Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
- Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- Komunikasi publik yang efektif.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bontang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan secara eksternal, Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya KPKNL Bontang dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel.

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

# Lampiran I Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG  
PERIODE TRIWULAN IV  
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	193,26%	14%	50%	193,26%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	44,88%	14%	50%	124,68%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							17,15%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang (setelah addendum)	P/M	100%	213,89%	14%	50%	213,89%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	184,62%	14%	50%	184,62%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							108,67%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,50	4,89	21%	100%	108,67%	108,67%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,78%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							120,00%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	88,93%	14%	24%	136,82%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	125,00%	19%	33%	125,00%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) (setelah addendum)	P/M	100%	160%	14%	24%	160,00%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	127,49%	11%	19%	127,49%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							107,61%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92,00	99,00	14%	100%	107,61%	107,61%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							117,65%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100,00%	14%	100%	117,65%	117,65%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,23%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							114,06%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	94,97	14%	50%	111,73%	111,73%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	96,63	14%	50%	120,79%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,41	14%	33%	110,45%	110,45%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							108,27%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	92,20%	14%	100%	96,54%	96,54%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/L	100,0%	183,00%	19%	45%	183,00%	120,00%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>116,16%</b>	<b>hijau</b>

Mengetahui,  
Kepala KPKNL Bontang

Kepala Seksi Kepatuhan Internal  
selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi

Harist Syafiuddin  
NIP 197802222002121002

Adhi Puspa Nugroho  
NIP 198305182004121004

## Lampiran II Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							29.90%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							119.61%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	73.81%	19%	40%	119.044%	119.04%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	124.05%	14%	30%	124.050%	120.00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	614%	14%	30%	613.75%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.73%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							113.65%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	92.00	97.11	11%	44%	105.56%	105.56%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	219.30%	14%	56%	219.30%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							109.44%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.45	4.87	21%	100%	109.44%	109.44%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33.10%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							106.36%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100.00%	19%	43%	100.00%	100.00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100.00%	11%	25%	100.00%	100.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0.00%	14%	32%	200.00%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114.95%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	150.00%	14%	25%	150.00%	120.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	38.89%	14%	25%	111.11%	111.11%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventi	P/M	92.00%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							102.43%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	93.22	14%	100%	102.43%	102.43%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							117.65%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	100.00%	14%	100%	117.65%	117.65%	hijau
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)							33.45%	
8	SDM yang kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							118.78%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M		0.00					abu-abu
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	96.75	14%	50%	129.00%	120.00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	94.05	14%	50%	117.56%	117.56%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							95.75%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	91.44%	14%	100%	95.75%	95.75%	kuning
10b-N	Persentase tindak lanjut temuan BA 15	P/M							abu-abu
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>113.19%</b>	<b>hijau</b>

Mengetahui,  
Kepala KPKNL Bontang



Harist Syarifuddin  
NIP. 197802222002121002

Kepala Seksi Kepatuhan Internal  
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi



Adhi Puspa Nugroho

### Lampiran III Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020

Kode	IKU	V/C	Target 2020	Realisasi 2020	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder / Customer Perspective (40%)								35,07%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							98,82%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	76,71%	14%	36%	76,706%	76,71%	merah
1b-CP	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	P/M	5%	9,63%	14%	36%	192,692%	120,00%	hijau
1c-N	Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/H	100%	100,00%	11%	28%	100,00%	100,00%	hijau
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							107,27%	
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,40	4,72	21%	100%	107,27%	107,27%	hijau
3	Pengelolaan lelang yang optimal							56,91%	
3a-CP	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	P/M	100%	56,91%	14%	100%	56,91%	56,91%	merah
Internal Process Perspective (30%)								33,98%	
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas							110,48%	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	P/H	90	99,43	11%	100%	110,48%	110,48%	hijau
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif							113,45%	
5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	19%	33%	100,00%	100,00%	hijau
5b-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	P/M	100%	233,33%	14%	24%	233,33%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	P/M	100%	177,74%	14%	24%	177,74%	120,00%	hijau
5d-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	133,33%	11%	19%	133,33%	120,00%	hijau
6	Penilaian yang berkualitas							120,00%	
6a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	30%	0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%	hijau
7	Tata kelola lelang yang efektif							115,56%	
7a-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	34%	43,36%	14%	50%	127,54%	120,00%	hijau
7b-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	90%	100,00%	14%	50%	111,11%	111,11%	hijau
8	Edukasi yang efektif							104,58%	
8a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	94,13	14%	100%	104,58%	104,58%	hijau
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							115,56%	
9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	P/M	80%	100,00%	14%	50%	125,00%	120,00%	hijau
9b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M	90%	100,00%	14%	50%	111,11%	111,11%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)								34,01%	
10	SDM yang kompeten							120,00%	
10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
11	Organisasi yang fit for purpose							117,18%	
11a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	P/M	70	81,59	14%	50%	116,56%	116,56%	hijau
11b-N	indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	P/M	80	94,24	14%	50%	117,80%	117,80%	hijau
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							102,91%	
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95%	97,76%	14%	100%	102,91%	102,91%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>103,06%</b>	<b>hijau</b>

Mengetahui,  
Kepala KPKNL Bontang



Heru Riyanto  
NIP197210281998031001

Kepala Seksi Kepatuhan Internal  
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi

Bramastyo Puji Lusiantoko  
NIP198612112010121005

## Lampiran IV Nilai Kinerja Organisasi Tahun

Kode	IKU	Tingkat Kenda li	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective (25%)						30,00%	
1	Pengelolaan keuangan negara yang optimal					120,00%	
1a-CP	Persentaserealisasi nilai manfaat ekonomipengelolaan keuangan negara	P/M	100%	215,07%	215,07%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	P/M	100%	267,04%	267,04%	120,00%	hijau
Customer Perspective (15%)						16,93%	
2	Pelayanan publik yang prima					105,72%	
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan pada Kantor pelayanan	E/M	4,37	4,62	105,72%	105,72%	hijau
3	Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan keuangan negara					120,00%	
3a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan	P/M	75	96,34	128,45%	120,00%	hijau
Internal Process Perspective (30%)						33,18%	
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas					117,24%	
4a-CP	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan keuangan negara	P/H	85	99,65	117,24%	117,24%	hijau
5	Tata kelola keuangan negara yang akuntabel					100,00%	
5a-CP	Persentase bidanngtambah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,00%	100,00%	100,00%	hijau
6	Tata kelola piutang negara dan lela ng yang akuntabel					105,39%	
6a-CP	Persentase hasil pengurusan piutang negara	P/M	100%	436,40%	436,40%	120,00%	hijau
6b-CP	Persentase hasil lela ng	P/M	100%	85,33%	85,33%	85,33%	uning
6c-CP	Persentase produktifitas lela ng	P/M	32%	35,47%	110,84%	110,84%	hijau
7	Edukasi yang efektif					110,45%	
7a-N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	P/M	88	97,20	110,45%	110,45%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif					120,00%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset	P/M	70%	100%	142,86%	120,00%	hijau
Learning & Growth Perspective (30%)						32,41%	
9	SDM yang kompetitif					111,56%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	87%	97%	111,56%	111,56%	hijau
10	Organisasi yang fit-for-purpose					112,16%	
10a-N	Nilai pemenuhan kriteria Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	P/M	75	84,90	113,20%	113,20%	hijau
10b-N	Nilai hasil reuview pengelolaan kinerja	P/M	85	94,46	111,13%	111,13%	hijau
11	Sistem manajemen informasi yang andal					106,36%	
11a-CP	Persentase implementasi e-auction	P/M	90%	95,73%	106,36%	106,36%	hijau
12	Pengelolaan anggaran yang optimal					101,99%	
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95%	96,90%	101,99%	101,99%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>						<b>112,52%</b>	

Mengetahui,  
Kepala KPKNL Bontang.



Heru Riyanto  
NIP 19721028 199803 1001

## Lampiran V Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2018

Kode	IKU	Tingkat Kendali	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
<b>Stakeholder Perspective (25%)</b>							30,00%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					120,00%	
1a-CP	Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara	P/M	100%	265,52%	265,52%	120,00%	hijau
1b-N	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	P/M	100%	167,68%	167,68%	120,00%	hijau
<b>Customer Perspective (15%)</b>							17,18%
2	Pelayanan publik yang prima					109,07%	
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan	P/M	4,3	4,69	109,07%	109,07%	hijau
3	Kepatuhan yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara					120,00%	
3a-N	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN	P/M	78	98,36	126,10%	120,00%	hijau
<b>Internal Process Perspective (30%)</b>							34,95%
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas					120,00%	
4a-N	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara	P/H	80	96,71	120,89%	120,00%	hijau
5	Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel					115,25%	
5a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/M	100%	125,00%	125,00%	120,00%	hijau
5b-N	Persentase penyelesaian koreksi nilai BMN	P/M	90%	100,00%	111,11%	111,11%	hijau
5c-N	Persentase obyek BMN yang telah direvaluasi	P/M	100%	114,65%	114,65%	114,65%	hijau
6	Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel					120,00%	
6a-CP	Persentase hasil pengurusan piutang negara	P/M	100%	441,63%	441,63%	120,00%	hijau
6b-CP	Persentase hasil lelang	P/M	100%	304,12%	304,12%	120,00%	hijau
6c-CP	Persentase produktifitas lelang	P/M	30%	55,04%	183,47%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang efektif					107,20%	
7a-N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	P/M	85	91,12	107,20%	107,20%	hijau
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif					120,00%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN	P/M	50%	100%	200,00%	120,00%	hijau
<b>Learning &amp; Growth Perspective (30%)</b>							32,72%
9	SDM yang kompetitif					111,11%	
9a-N	Persentase pemenuhan standar hard competency	P/M	90%	100%	111,11%	111,11%	hijau
10	Organisasi yang fit-for-purpose					120,00%	
10b-N	Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja	P/M	70	84,03	120,04%	120,00%	hijau
11	Sistem manajemen informasi yang andal					98,18%	
11a-N	Persentase implementasi e-auction	P/M	85%	83,45%	98,18%	98,18%	kuning
12	Pengelolaan anggaran yang optimal					106,97%	
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/H	95%	101,62%	106,97%	106,97%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>							<b>114,85%</b>

Mengetahui,  
Kepala KPKNL Bontang,



**Heru Riyanto**  
NIP 19721028 199803 1001

## REKAP 1: K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
2. VISI : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"
3. MISI : 1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan  
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif  
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif  
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum  
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

#### 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	453.993.886,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	24.949.736,0
	Total	478.943.622,0

#### 5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
11	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif		35.541.916,0
11.01	Rasio Defisit terhadap PDB	(2,79%)-(3,55%)	
11.02	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	
21	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal		2.700.749.898,0
21.01	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,27%-8,70%	
21.02	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	
21.03	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	64%	
31	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat		17.340.779,0
31.01	Indeks kualitas belanja pemerintah	82	
31.02	Indeks ketimpangan antar wilayah	0,240	
31.03	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	28,94%	



KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
41	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel		74.953.020,0
41.01	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,10	
41.02	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	
41.03	Nilai kinerja anggaran K/L	81,2	
41.04	Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	93%	
42	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial		82.455.395,0
42.01	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	60%	
42.02	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	
43	Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali		20.627.899,0
43.01	Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	
43.02	Rasio Utang terhadap PDB	36,65% - 37,39%	
43.03	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	
51	Organisasi dan SDM yang optimal		29.539.367.881,0
51.01	Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,10	
51.02	Persentase penyelesaian delayering	100%	
51.03	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	89,0%	
51.04	Tingkat implementasi learning organization	80%	
51.05	Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	82%	
51.06	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	-	
51.07	Persentase pemenuhan Gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	90%	
52	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi		2.567.432.920,0
52.01	Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	
52.02	Persentase penyelesaian project strategis TIK	90%	
53	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah		37.286.754,0
53.01	Indeks integritas	91	
53.02	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4	
54	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal		8.937.101.506,0
54.01	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	
54.02	Dwelling time	3,4 hari - 2,9 hari	
Total			44.012.857.968,0

## 6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
015.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	15.745.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.595.347,0	0,0	0,0	0,0	17.340.779,0	19.097.630,0	19.330.656,0	19.572.162,0
015.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.700.749.898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700.749.898,0	2.610.441.907,0	2.623.624.961,0	2.623.740.296,0
015.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	137.277.783,0	2.876.197,0	27.394.472,0	0,0	0,0	0,0	10.487.862,0	0,0	0,0	0,0	178.036.314,0	194.841.241,0	196.630.597,0	197.198.534,0
015.CE	Program Kebijakan Fiskal	35.541.916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.541.916,0	42.704.500,0	42.939.927,0	43.032.937,0
015.WA	Program Dukungan Manajemen	31.728.496.733,0	4.210.000,0	9.338.315.028,0	0,0	0,0	0,0	10.167.300,0	0,0	0,0	0,0	41.081.189.061,0	45.384.335.920,6	46.316.586.069,0	44.932.334.723,0
<b>Total</b>		<b>34.617.811.762,0</b>	<b>7.086.197,0</b>	<b>9.365.709.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22.250.509,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.012.857.968,0</b>	<b>48.251.421.198,6</b>	<b>49.199.112.210,0</b>	<b>47.815.878.652,0</b>

Jakarta, 15 Februari 2022

## Lampiran VII Rencana Aksi Subbagian Umum

**TIMELINE PROGRAM/RENCANA KERJA**  
SUB UNIT KERJA : Subbagian Umum KPKNL Bontang

No.	Kegiatan/Program Kerja Subbagian Umum	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	<b>Kepegawaian</b>												
	Melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai di lingkungan KPKNL.	✓						✓					
	Melaksanakan penyelenggaraan administrasi penilaian kinerja pegawai	✓						✓					
	Melaksanakan penyelenggaraan administrasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)		✓	✓									
	Melaksanakan penyelenggaraan administrasi Tunjangan Keluarga (KP4).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan penyelenggaraan urusan surat masuk dan surat keluar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan.	✓						✓					
	Melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai (KARIS, KARPEG, KIS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan penyusunan laporan absensi bulanan kantor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan analisis beban kerja di lingkungan KPKNL.			✓			✓			✓			✓
2	<b>Jabatan Fungsional</b>												
	Melaksanakan pengelolaan arsip jabatan fungsional di lingkungan KPKNL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip.										✓	✓	✓
	Melaksanakan penyiapan dukungan teknis dalam rangka mendukung kegiatan pejabat fungsional.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	<b>Kuangan/Anggaran</b>												
	Melaksanakan penyusunan rencana Pembiayaan Rutin berdasarkan dana yang tersedia dalam DIPA			✓			✓			✓			✓
	Melaksanakan pembayaran uang lembur/uang makan dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan atau penghasilan lainnya para pegawai di lingkungan KPKNL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	<b>BMN dan TURT</b>												
	Melaksanakan kelengkapan sarana dan prasarana pada Area Pelayanan Terpadu (APT) dan bangunan kantor di lingkungan KPKNL	✓	✓	✓									
	Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara pada KPKNL.							✓	✓	✓			
	Melaksanakan pengadaan barang milik negara kantor sesuai dengan batas kewenangan KPKNL	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	Melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan barang milik negara di lingkungan KPKNL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan penyelenggaraan pengamanan dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Melaksanakan penyusunan konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor			✓			✓			✓			



## Lampiran IX Rencana Aksi Seksi Piutang Negara

TIMELINE PROGRAM/RENCANA KERJA  
SUB UNIT KERJA: Seksi Piutang Negara KPKNL Bontang

No.	Kegiatan/Program Kerja Seksi Piutang Negara	Tawulan I			Tawulan II			Tawulan III			Tawulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Melakukan penagihan melalui media persuratan, Whatsapp, dan pemanggilan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Melakukan penelusuran terkait data-data Penanggung Hutang, baik secara mandiri atau permintaan data kepada instansi-instansi terkait.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tindak lanjut pengurusan terhadap barang jaminan milik Penanggung hutang penyerahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, meliputi: a. Penyitaan; b. Pemblokiran; dan/atau c. Lelang.			✓			✓				✓		
4.	Melakukan penggalian potensi piutang daerah kepada instansi pemerintah daerah, seperti Rumah Sakit, Dinas Koperasi dan UKM terkait peyaluran dana bergulir.	✓		✓		✓		✓		✓			
5.	Melakukan penagihan ke lapangan bersama dengan Penyerah Piutang terhadap Penanggung Hutang*		✓		✓			✓					

## Lampiran X Rencana Aksi Seksi Hukum dan Informasi

**TIMELINE PROGRAM/RENCANA KERJA**  
SUB UNIT KERJA: Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Bontang

No.	Kegiatan/Program Kerja Seksi Hukum dan Informasi	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des	
1.	Menjalankan fungsi hukum dan kehumasan yang meliputi: a. Melaksanakan penanganan perkara, bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum kepada seksi teknis KPKNL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Menyajikan Laporan Akuntabilitas Tahun 2023, Laporan Tahunan Rencana Kerja KPKNL Bontang Tahun 2024, Laporan Sibankum, laporan informasi dan dokumentasi kepada Kepala Kantor dan seksi teknis terkait	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Melaksanakan penyampaian informasi kepada publik terkait produk layanan KPKNL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Melaksanakan sharing knowledge terkait tugas dan fungsi seksi Hukum dan Informasi		✓	✓	✓									
	e. Publikasi berita dan artikel pada portal DJKN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Melaksanakan manay terhadap penanganan perkara/gugatan yang ada dan akuntabilitas laporan Sibankum								✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Melaksanakan manay akurasi pelaporan akuntabilitas keuangan/PNBP, laporan tahunan, laporan informasi dan dokumentasi kegiatan terkait penayangan kegiatan baik di Portal DJKN maupun sosial media								✓	✓	✓	✓	✓	✓
	h. Manay terkait pelaksanaan sharing knowledge terkait tugas dan fungsi seksi Hukum dan Informasi								✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Menjalankan fungsi pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi: a. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan terkait infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Mengimplementasikan join domain ke semua perangkat, baik personal computer maupun laptop baru	✓	✓	✓										
	c. Melakukan pemeliharaan Sistem TIK secara rutin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Menjalankan fungsi pengelolaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang yang meliputi: a. Melakukan pengelolaan pembayaran uang hasil lelang yang meliputi uang jaminan dan pelunasan lelang, penyetoran PNBP, pajak hasil bersih lelang dan layanan pemberian kuitansi pembayaran harga lelang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Melakukan pengelolaan pembayaran piutang negara yang meliputi penerimaan, angsuran dan pelunasan, pembayaran biad pengurusan piutang negara dan hak penyerah piutang negara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Melaksanakan percepatan proses identifikasi, verifikasi, konfirmasi dan penyelesaian atas saldo dana mengendap pada rekening penampungan bendahara penerimaan	✓			✓						✓			✓
	d. Menyajikan laporan-laporan terkait kebhendaharaan seperti laporan pertanggungjawaban, LPSK, LPJ PNBP dan Laporan Saldo Bekening	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi capaian hasil PNBP dan seksi Pengelolaan Keuangan Negara, seksi Pelayanan Lelang dan seksi Piutang Negara secara rutin dan periodik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Menyajikan data dan informasi penyetoran Hasil Bersih Lelang dalam rangka Pemantuan Pengendalian Utama Administrasi Lelang	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Menyajikan informasi daftar pengguna jasa layanan KPKNL Bontang (layanan lelang)						✓							✓

## Lampiran XI Rencana Aksi Seksi Kepatuhan Internal

**TIMELINE PROGRAM/RENCANA KERJA**  
SUB UNIT KERJA: Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Bontang

No.	Kegiatan/Program Kerja Seksi Kepatuhan Internal	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Penyusunan Kontrak Kinerja Organisasi	✓											
2	Penandatanganan Kontrak Kerja Organisasi		✓										
3	Penyusunan Piagam Risiko dan Manajemen Risiko Tahun 2023	✓											
4	Pemantauan Pengendalian Internal Tingkat Aktivitas (PPITA)/LHPPU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Pelaksanaan DKO dan Money Man. Risiko	✓			✓			✓			✓		
6	Penyusunan Profil Pegawai (bersifat tertutup)												
7	Pemantauan Fraud Risk Scenario (FRS)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Reviu Gerakan Efisiensi							✓					✓
9	Pemantauan Lapangan Terkait Proses Bisnis												
	a. Layanan Pelaksanaan Lelang	✓				✓				✓			
	b. Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara		✓				✓				✓		
	c. Layanan Penilaian			✓				✓				✓	
	d. Layanan Piutang Negara				✓				✓				✓





[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)  
[www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)  
[www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang)



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA